BAB III
GAMBARAN UMUM

Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai gambaran umum lokasi kawasan calon pengembangan transmigrasi lokal dengan arahan tematik yang meliputi; gambaran umum kabupaten Belu, gambaran umum kecamatan Lamaknen Selatan, gambaran umum Desa Lakmaras dan Desa Loonuna. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat di bawah ini:

3.1 Gambaran Umum Kabupaten Belu

3.1.1 Sejarah dan Perkembangan Kabupaten Belu

3.1.1.1 Sejarah

Kata Belu menurut penuturan para tetua adat bermakna persahabatan yang bila diterjemahkan secarah harafiah ke dalam bahasa Indonesia berarti teman atau sobat. Ini merupakan makna symbol yang mendeskripsikan bahwa pada zaman dahulu para penghuni Belu memang hidup saling memperhatikan dan bersahabat dengan siapa saja. Namun secara politis oleh Pemerintah Belanda, Belu dibagi menjadi dua bagian yaitu Belu bagian utara dan Belu bagian selatan, yang hingga sekarang masih terasa pengaruhnya.

Sedangkan Atambua yang merupakan Ibukota Kabupaten Belu memiliki sejarah tersendiri. Nama tersebut berasal dari kata Ata yang artinya hamba dan Buan yang artinya suanggi. Jadi Atambua artinya tempatnya hamba-hamba suanggi yang konon di daerah ini dipergunakan oleh para raja sebagai tempat pembuangan para suanggi yang mengganggu masyarakat. Kemudian dalam perkembangannya kata Atabuan mengalami penyisipan fonem “M” . Hal ini dapat saja terjadi dengan tidak sengaja karena fonem “B” dan “M” masih memiliki titik artikulasi yang sama sehingga mampu mempertahankan kelancaran ucapan.

3.1.1.2 Masa Pendudukan Belanda

Masa Pendudukan Belanda di kabupaten Belu juga merupakan sebuah perjalanan sejarah yang turut membentuk kabupaten Belu menjadi seperti sekarang. Masa pendudukan Belanda di kabupaten Belu terbagi ke dalam tiga periode waktu yaitu :

1. **Periode waktu yang pertama, pada tahun 1866-1911**: Atapupu pernah jadi pusat Pemerintahan Hindia Belanda untuk kawasan ini. Sebelumnya Belanda menjalankan pemerintahan dari Kupang (ibu kota propinsi NTT sekarang)

2. **Periode waktu yang kedua, pada tahun 1911-1916**: Berdao, yang terletak di tapal batas dengan Timor Portugis, telah menjadi Benteng Pertahanan Belanda
3. **Periode waktu yang ketiga, pada tahun 1916-1942**: Pusat Pemerintahan Belanda pindah dari Atapupu ke Atambua (Ibu Kota Kabupaten Belu sekarang)

3.1.1.3 Panitia Pemerintahan Sementara (PPS) Swapraja Belu Terbentuk

Pada tanggal 20 September 1923 : Controleur Belu, Van Raesfild Meyer menerbitkan memori tentang Struktur Pemerintahan di Wilayah Belu, yang meliputi seluruh wilayah Belu plus Insana, dan Biboki di TTU (sekarang)

3.1.1.4 Belu dibawah Dai Nippon

Pendudukan Dai Nippon di kabupaten Belu, meskipun terbilang cukup singkat namun pendudukan tersebut menorehkan beberapa catatan sejarah tersendiri bagi kabupaten Belu. Belu dibawah Dai Nippon dibagi kedalam beberapa periode, yaitu :

1. Pada tanggal 20 Februari 1942: Tentara Jepang mendarat di Batulesa, Kab. Kupang (sekarang), di bawah pimpinan Jendral Hayakawa.
2. Pada tanggal 8 Maret 1942: Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang
3. Pada bulan April 1942: Tentara Dai Nippon masuk Atambua. Controleur Belanda, Mr. H.C. de Haan dan keluarga ditawan.
4. Pemerintahan Jepang di Belu dikendalikan dari laut oleh Onderafdelling yang dipimpin pembesar Jepang dengan sebutan : Atambua Bun Ken.
5. Romusha: Sistem kerja paksa diterapkan Jepang atas rakyat Belu. Rakyat wajib membuat lubang-lubang perlindungan dan hpertahanan bagi tentara Jepang (masih ada di Teluk Gurita sampai sekarang)

3.1.1.5 Lahir Kabupaten Belu

Proses lahirnya Belu menjadi sebuah kabupaten defenitif juga dibagi kedalam beberapa periode waktu, yaitu :

1. **Pada kisaran tanggal 6-8 Agustus 1945**: Jepang menyerah kepada AS (sekutu), atas seruan Kaiser Tenno Heika. Berakhir pula pendudukan tentara Dai Nippon di Indonesia termasuk Belu.
2. **Pada tanggal 29 Oktober 1958**: Lahirlah UU No. 69 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan terbentuk pula Daerah Tingkat II Belu
3. Pejabat Pemerintahan Belu : Alfonsius Andreas Bere Tallo sebagai Kepala Daerah Tingkat II Belu

4. **Pada tanggal 20 Mei 1959**: DPRD Peralihan Daerah Tk. II Belu yang terdiri dari 15 Anggota dengan Ketua B.J Manek dan Wakil Ketua C. Mau
5. **Pada tanggal 16 Pebruari 1960**: Bupati pertama terpilih atas nama A.A. Bere Tallo, dan dilantik oleh Gubernur NTT W.J. Lalamentik pada 9 Mei 1960

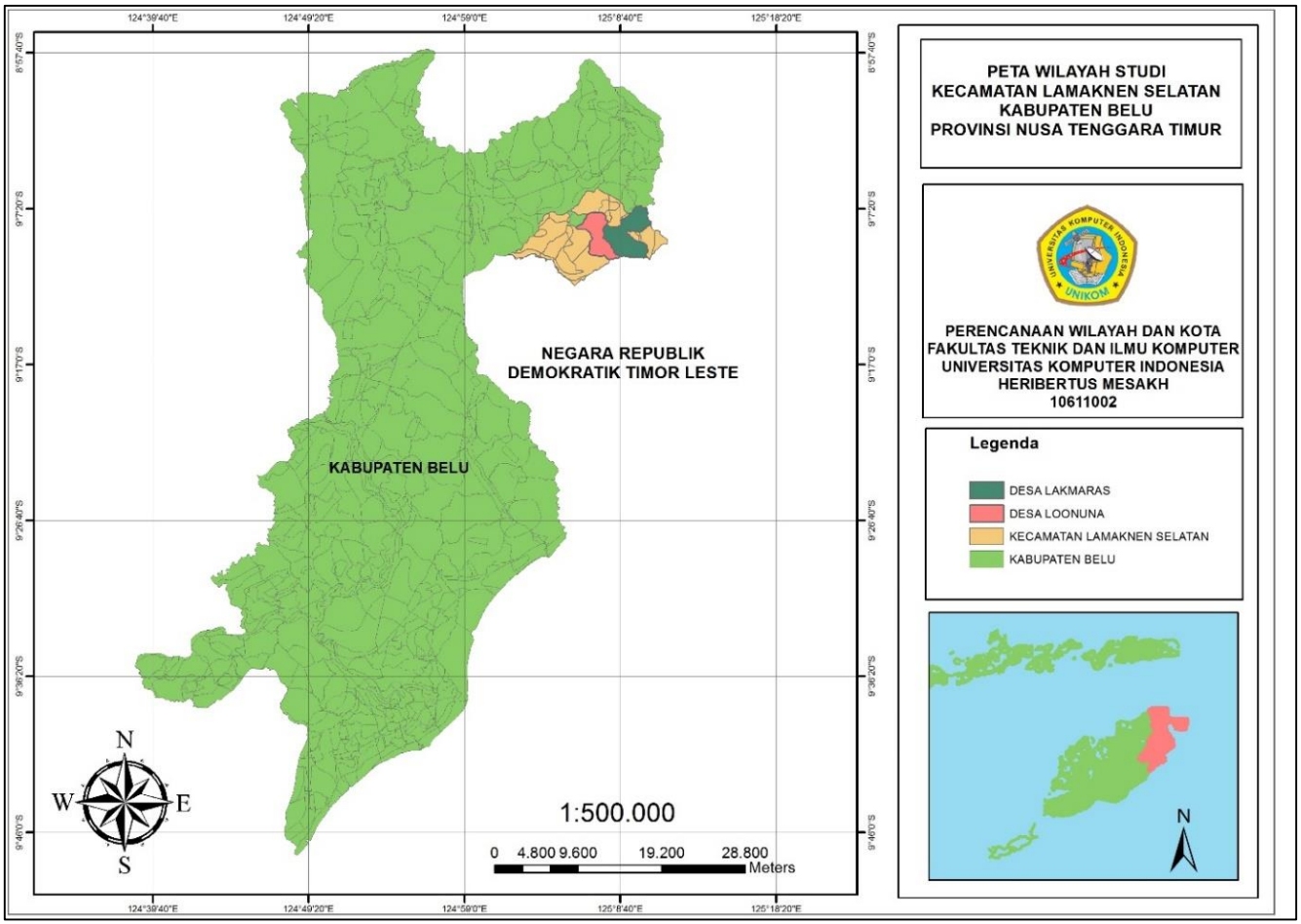
3.1.2 Kependudukan

Berdasarkan data terbaru (2014) dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu, jumlah penduduk Kabupaten Belu sebanyak 229.561 jiwa dengan jumlah laki-laki 115.839 jiwa dan perempuan 113.772 jiwa.

3.1.3 Letak Geografis dan Batasan Daerah Kabupaten Belu

Kabupaten Belu adalah sebuah kabupaten di provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Kabupaten ini beribukota di Kota Atambua. Memiliki luas wilayah 1.284,94 km², terbagi dalam 12 kecamatan, 12 kelurahan dan 96 desa, termasuk 30 desa dalam 8 kecamatan perbatasan.

Gambar 3. 1 Peta Kabupaten Belu



Sumber : Hasil survei, 2015

3.1.4 Karakteristik Fisik Kabupaten Belu

3.1.4.1 Klimatologi Kabupaten Belu

Secara umum Kabupaten Belu beriklim tropis, dengan musim hujan yang sangat pendek (Desember – Maret) dan musim kemarau yang panjang (April – Nopember). Curah hujan rata-rata per kecamatan sebagai berikut:

- < 1000 mm/tahun meliputi wilayah Kecamatan Raimanuk, Kakulukmesak dan sebagian Kecamatan Kobalima.
- Antara 1000 – 1500 mm/tahun meliputi wilayah kecamatan Malaka Barat , Malaka Tengah, Malaka Timur, Sasitamean, Lamaknen, Raihat dan sebagian kecamatan Kobalima.
- Antara 1500 – 2000 mm/tahun meliputi wilayah kecamatan Rinhat.
- Antara 2000 – 3000 mm/tahun meliputi wilayah kecamatan Kota Atambua, Tasifeto Barat, Sebagian Kakulukmesak dan Kecamatan Tasifeto Timur.

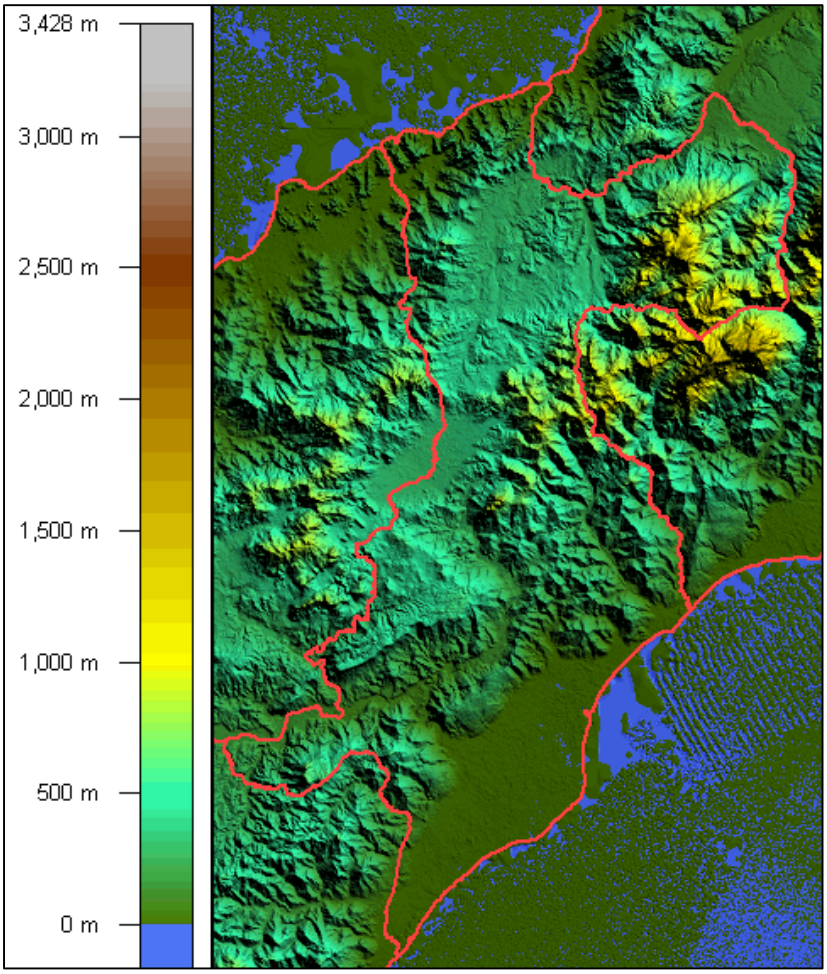
Data curah hujan kabupaten Belu selama 13 tahun (1993-2005) menunjukan bahwa curah hujan tertinggi pernah terjadi di di Kecamatan Tasifeto Timur (stasiun Wedomu) sebesar 1.648 mm/tahun pada tahun 2002, dan di kecamatan Kakulukmesak (Stasiun Umarese) pada tahun yang sama sebesar 11.905 mm. Berdasarkan data-data tersebut, curah hujan terendah terdapat di Kecamatan Raimanuk (Stasiun Sukabitetek) dan sebagian kecamatan Kobalima (stasiun Rainawe). Jumlah hari hujan rata-rata tahun 2004 adalah 58 hari dengan hari hujan terbanyak terdapat di Kecamatan Raihat 112 hari hujan.

Temperatur di Kabupaten Belu berkisar suhu suhu rata-rata 27,6º dengan interval 21,5º - 33,7º C. Temperatur terendah 21,5º yang terjadi pada bulan Agustus dengan temperatur tertinggi 33,7º yang terjadi pada bulan Nopember.

3.1.4.2 Karakteristik Fisik (Topografi)

Keadaan topografi Kabupaten Belu bervariasi antara ketinggian 0 sampai dengan $\pm$1500 m.dpal (meter di atas permukaan laut). Variasi ketinggian rendah (0-150 m.dpal) mendominasi wilayah bagian selatan dan sebagian kecil di bagian utara. Sementara pada bagian tengah wilayah ini terdiri dari area dengan dataran sedang (200-500 m.dpal). Dataran tinggi di Kabupaten Belu ini hanya menempati kawasan pada bagian timur yang berbatasan langsung dengan RDTL. Zone-zone dataran rendah di bagian selatan ini sebagian besar digunakan sebagai areal pertanian dan kawasan cagar alam hutan mangrove.

Gambar 3. 2 Peta Topografi Kabupaten Belu



Sumber : RPJMD 2009-2014

3.1.4.3 Karakteristik Tanah dan Geologis

Karakteristik tanah menggambarkan potensi fisik tanah yang meliputi keadaan drainase tanah, keadaan kedalaman tanah (solum), keadaan tekstur tanah dan keadaan jenis tanah.

Keadaan drainase tanah di Kabupaten Belu pada umumnya sangat baik. Kategori ini menempati areal seluas 177.831 Ha (76,71 %), sementara 5.325 Ha (2.38 %) masuk kategori drainase sangat jelek yang berada di sekitar Kecamatan Malaka Barat, Kecamatan Malaka Tengah dan Kecamatan Wewiku. Gambaran mengenai keadaan drainase tanah ini sangat diperlukan untuk mendukung pengembangan pertanian dan perkebunan di Kabupaten Belu.

Keadaan kedalaman tanah (solum) sangat mempengaruhi dalam kegiatan pertanian dan perkebunan. Tanah dengan solum yang dangkal hanya cocok untuk pengembangan tanaman semusim dengan kondisi perakaran yang pendek, sedangkan keadaan tanah dengan solum yang dalam cocok untuk pengembangan, baik tanaman semusim maupun tanaman

perkebunan (tanaman tahunan) yang memiliki kondisi perakaran yang panjang. Keadaan kedalaman tanah di Kabupaten Belu dirinci sebagai berikut:

- Kedalaman < 25 cm seluas 273 Ha (0,12 %)
- Kedalaman 26 – 50 cm seluas 15.536 Ha (6,94 %)
- Kedalaman 51 – 75 cm seluas 33.818 Ha (15,10 %)
- Kedalaman > 75 cm seluas 174.378 Ha (77,85 %)

Untuk kedalaman tanah kurang dari 25 cm berada di wilayah Kecamatan Malaka Tengah. Untuk kedalaman tanah antara 26 – 50 cm lokasinya tersebar diantara beberapa kecamatan yaitu diantara daerah perbatasan administrasi tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Lamaknen, Tasifeto Timur dan Lasiolat. Sebagian di daerah Kecamatan Sasitamean dan Kecamatan Weliman.

Keadaan kedalaman tanah di Kabupaten Belu sangat cocok untuk pengembangan tanaman perkebunan karena luas tanah yang memiliki solum lebih dari 75 cm meliputi 77,85 % dari luas wilayah Kabupaten Belu.

Keadaan tekstur tanah juga sangat menentukan jenis tanaman yang akan diusahakan. Tanah dengan tekstur halus sampai sedang sangat cocok untuk pengembangan tanaman semusim dan juga tanaman perkebunan, sedangkan tanah dengan tekstur kasar lebih cocok untuk pengembangan tanaman tahunan (tanaman perkebunan). Keadaan tekstur tanah di Kabupaten Belu seperti berikut ini:

- Tanah bertekstur halus seluas 58.380 Ha (26,31%)
- Tanah bertekstur agak halus seluas 162.466 Ha (73,21%)
- Tanah bertekstur agak kasar seluas 1.079 Ha (0,49%)

Jenis tanah dipengaruhi oleh proses pelapukan yang terjadi pada berbagai kelompok batuan, batuan metamorf dan batuan endapan. Umumnya batuan endapan mendominasi daerah Kabupaten Belu, dengan kondisi stratigrafi geologis dari tua ke muda.

3.1.4.4 Hidrologis dan Hidrogeologis Kabupaten Belu

A. Air Tanah

Air tanah di Kabupaten Belu terdiri atas air tanah bebas dan air tanah tertekan. Air tanah bebas umumnya dangkal dan mengikuti kondisi morfologi tanah, sedangkan air tanah tertekan terletak jauh di bawah tanah dengan lapisan yang kedap air. Pada setiap kecamatan di Kabupaten Belu di temukan sumber air tanah tertekan, sedangkan air tanah

bebas umumnya ditemukan pada dataran rendah dekat pantai pada endapan alluvial dekat dengan air permukaan.

B. Air Permukaan

Air permukaan yang dimaksud disini yaitu air yang mengalir lewat permukaan tanah seperti sungai dan mata air. Aliran sungai yang besar biasanya mengalir sepanjang tahun, tetapi ada juga sungai yang kering pada musim kemarau. Hal ini terjadi karena fluktuasi curah hujan yang sangat kontras antar bulan dan dipengaruhi juga oleh kondisi geologi dan morfologi wilayah.

Sumber air tanah berupa sumur bor dan air permukaan berupa sungai seperti yang dijelaskan di atas selain digunakan oleh masyarakat untuk keperluan domestik seperti untuk kebutuhan rumah tangga dan digunakan untuk kegiatan-kegiatan pertanian seperti air irigasi untuk pertanian padi sawah. Sungai-sungai seperti yang disebutkan diatas sudah banyak yang digunakan sebagai air irigasi.

Menurut data yang dikeluarkan oleh Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Belu, ada 15 sungai di wilayah Kabupaten Belu.

Tabel 3.1 Nama dan Panjang Sungai Di Kabupaten Belu Per Kecamatan

No	Kecamatan	Nama Sungai	Panjang (km)
1.	Malaka Barat	Benenai	100
		Mota delek	15
2.	Malaka Tengah	Baen	30
		Wedik	10
3.	Malaka Timur	Talimetan	8
		Motahoar	7
4.	Tasifeto Barat	Motabuik	41
		Luradik	10
5.	Tasifeto Timur	Baukama	45
		Baukoek	10
		Motumoru	15
		Malibaka	50
6.	Lamaknen	Weluli	18
7.	Kobalima	Motabalu	28
8.	Kota Atambua	Talau	50

Sumber : : Dinas Kimpraswil Kabupaten Belu 2003 (RPJMD Kabupaten Belu)

3.1.4.5 Rawan Bencana Wilayah Studi

Seperti yang dijelaskan dalam RTRW kabupaten Belu tentang kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Ayat (2) huruf e meliputi :

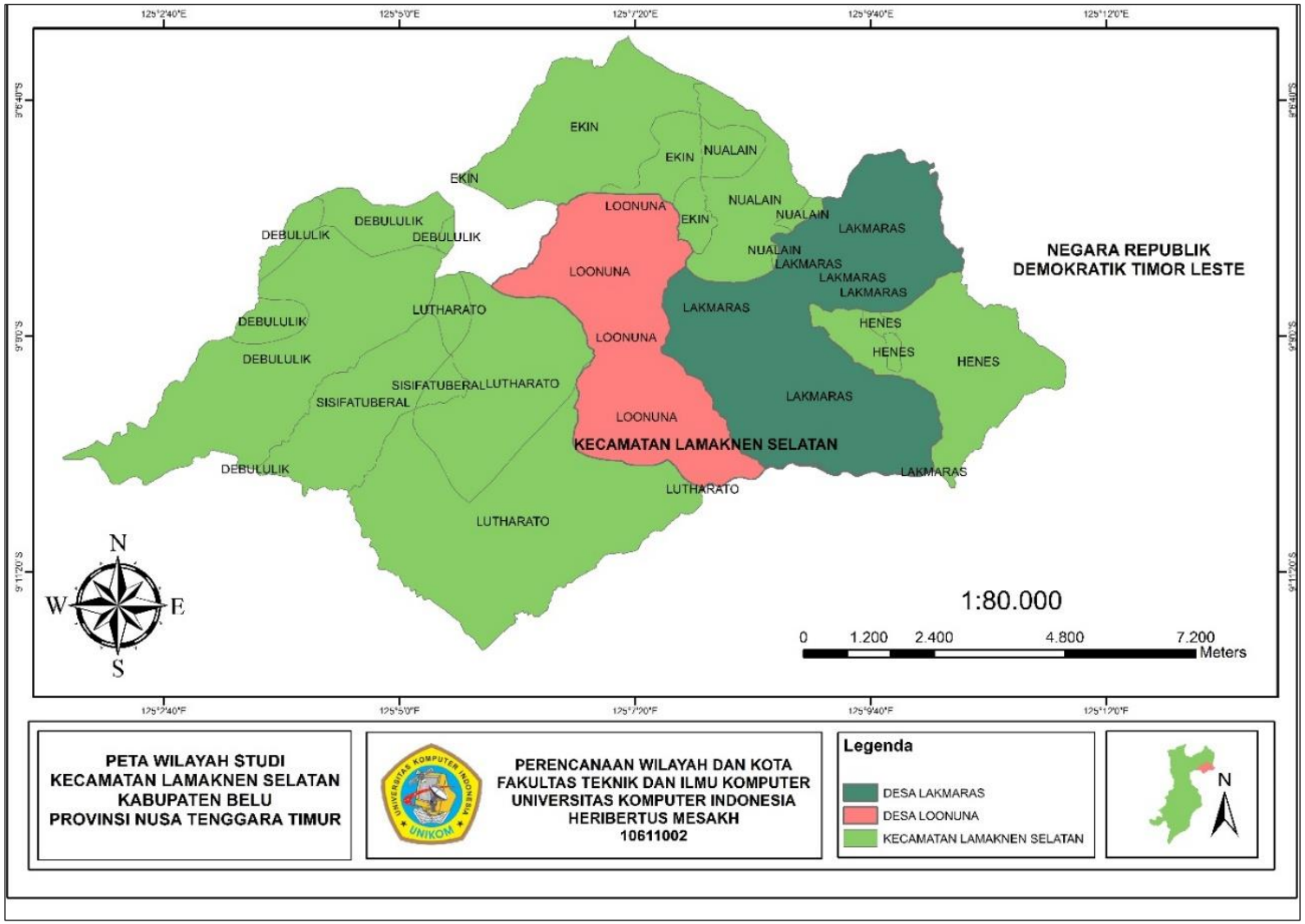
A. kawasan rawan bencana tanah longsor atau zona gerakan tanah kerentanan tinggi meliputi meliputi, Kecamatan Kobalima, Kecamatan Kobalima Timur, Kecamatan Malaka Timur, Kecamatan Raimanuk, Kecamatan Nanaet Duabesi, Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Atambua Barat, Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Lasiolat, Kecamatan Raihat, Kecamatan Lamaknen, dan Kecamatan Lamaknen Selatan;
B. kawasan rawan bencana banjir meliputi Kecamatan Kobalima, Kecamatan Malaka Tengah, Kecamatan Malaka Barat, Kecamatan Wewiku, dan Kecamatan Weliman; dan
C. kawasan rawan abrasi pantai di Desa Silawan Kecamatan Tasifeto Timur dan Desa Jenilu Kecamatan Kakuluk Mesak.

Wilayah studi yang berada dikecamatan Lamaknen Selatan termasuk kawasan rawan bencana tanah longsor atau zona gerakan tanah kerentanan tinggi. Hal ini juga disampaikan oleh tokoh masyarakat dari wawancara yang di lakukan. Stefanus Ati selaku tokoh masyarakat menjelaskan bahwa bencana alam yang pernah terjadi di wilayah studi adalah bencana tanah longsor, Namun menurutnya kejadian bencana longsor tersebut terjadi beberapa tahun yang lalu.

3.2 Gambaran Umum Kecamatan Lamaknen selatan

Kecamatan Lamaknen Selatan merupakan kecamatan dari wilayah studi, beberapa desa di kecamatan ini berbatasan darat secara langsung dengan Negara Republik Demokrat Timor Leste diantaranya desa Henes, desa Lutharato, desa Sisifatuberal, desa Debululik, serta desa Lakmaras dan Loonuna yang merupakan wilayah studi dalam penelitian ini. Kecamatan Lamaknen Selatan adalah hasil pemekaran dari kecamatan Lamaknen yang berada dibagian utara secara geografis. Jumlah penduduk Kecamatan Lamaknen Selatan adalah 8.500 jiwa, dengan jumlah laki-laki 4.201 jiwa dan perempuan 4.299 jiwa dan jumlah kepala keluarga di kecamatan ini berjumlah 1.956 KK. Kecamatan Lamaknen Selatan termasuk salah satu dari lima kecamatan dengan populasi terkecil di kabupaten Belu.

Gambar 3. 3 Peta Kecamatan Lamaknen Selatan



Sumber : hasil Survei, 2015

3.3 Gambaran Umum Desa Lakmaras dan Desa Loonuna

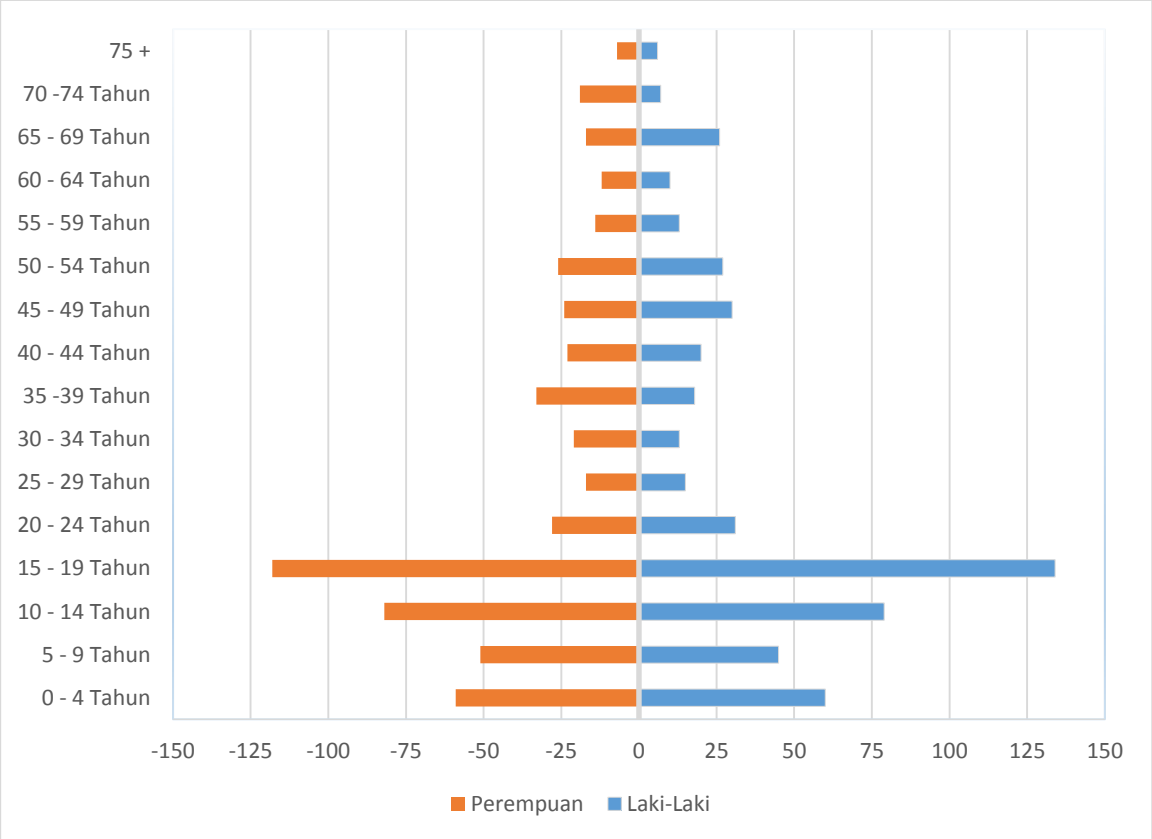
3.3.1 Gambaran Umum Desa Lakmaras

Desa Lakmaras berada di Kecamatan Lamaknen Selatan dengan luas wilayah 21,39Km². Berdasarkan letak wilayahnya, Desa Lakmaras berbatasan dengan :

- Sebelah utara : Desa Nualain
- Sebelah selatan : Negara Timor Leste
- Sebelah Timur : Desa Henes
- Sebelah Barat : Desa Loonuna

Jumlah penduduk Desa Lakmaras adalah 1072 jiwa dengan jumlah laki-laki 521 jiwa dan perempuann 551 jiwa. Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang tersebar di desa Lakmaras adalah 270 KK. Pola permukiman penduduk didesa ini terbagi menjadi dua yaitu Pola permukiman memanjang (linear) dan Sebagian pola permukiman menyebar, dimana pola permukiman memanjang (linear) yaitu pemukiman penduduk yang berada di sepanjang jalan atau mengikuti jalan, sedangkan sebagian yang merupakan pola permukiman menyebar adalah permukiman penduduk yang tidak memanjang (linear).

Grafik 3.4 Piramida Penduduk berdasarkan usia di Desa Lakmaras Tahun 2014



Tingkat pendidikan penduduk di desa ini, rata-rata adalah tamat SD sampai dengan jenjang pendidikan SMA. Jenis matapencaharian yang digeluti oleh penduduk desa ini, sebagian besarnya adalah sebagai petani.

3.3.2 Gambaran Umum Desa Loonuna

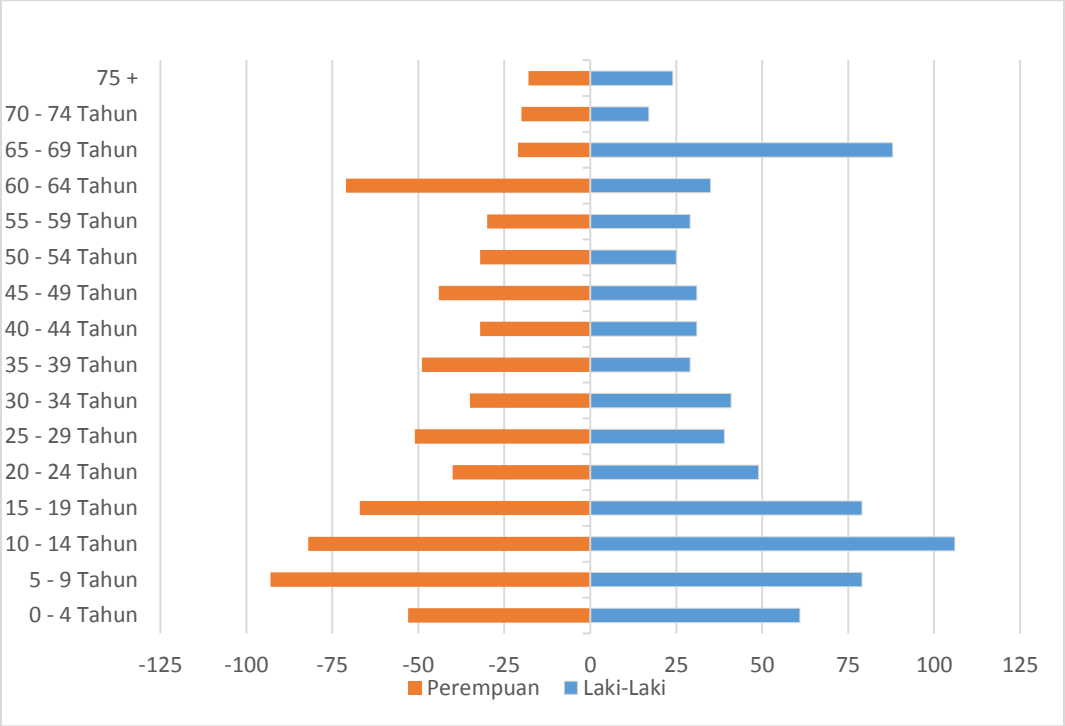
Sama halnya dengan Desa Lakmaras, Desa Lakmaras juga merupakan salah desa yang berbatasan darat secara langsung dengan Republik Demokrat Timor Leste. Luas wilayah desa Loonuna adalah 30,04Km². Secara fisik batas wilayah desa Loonuna adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Ekin dan Desa Nualain
- Sebelah selatan : RDTL
- Sebelah Timur : Desa Lakmaras
- Sebelah Barat : Sisi Fatuberal

Jumlah penduduk Desa Loonuna adalah 1487 jiwa dengan jumlah laki-laki 706 jiwa dan perempuan berjumlah 781. Jumlah Kepala Keluarga di desa ini berjumlah 356 KK. Sama halnya dengan desa Lakmaras, pola permukiman di desa Loonuna ini terbagi menjadi dua yaitu Pola permukiman memanjang (linear) dan Sebagian pola permukiman menyebar.

Dari kondisi sosial ekonomi terdapat beberapa Kepala Keluarga (KK) di desa Loonuna menempati atau menghuni satu rumah.

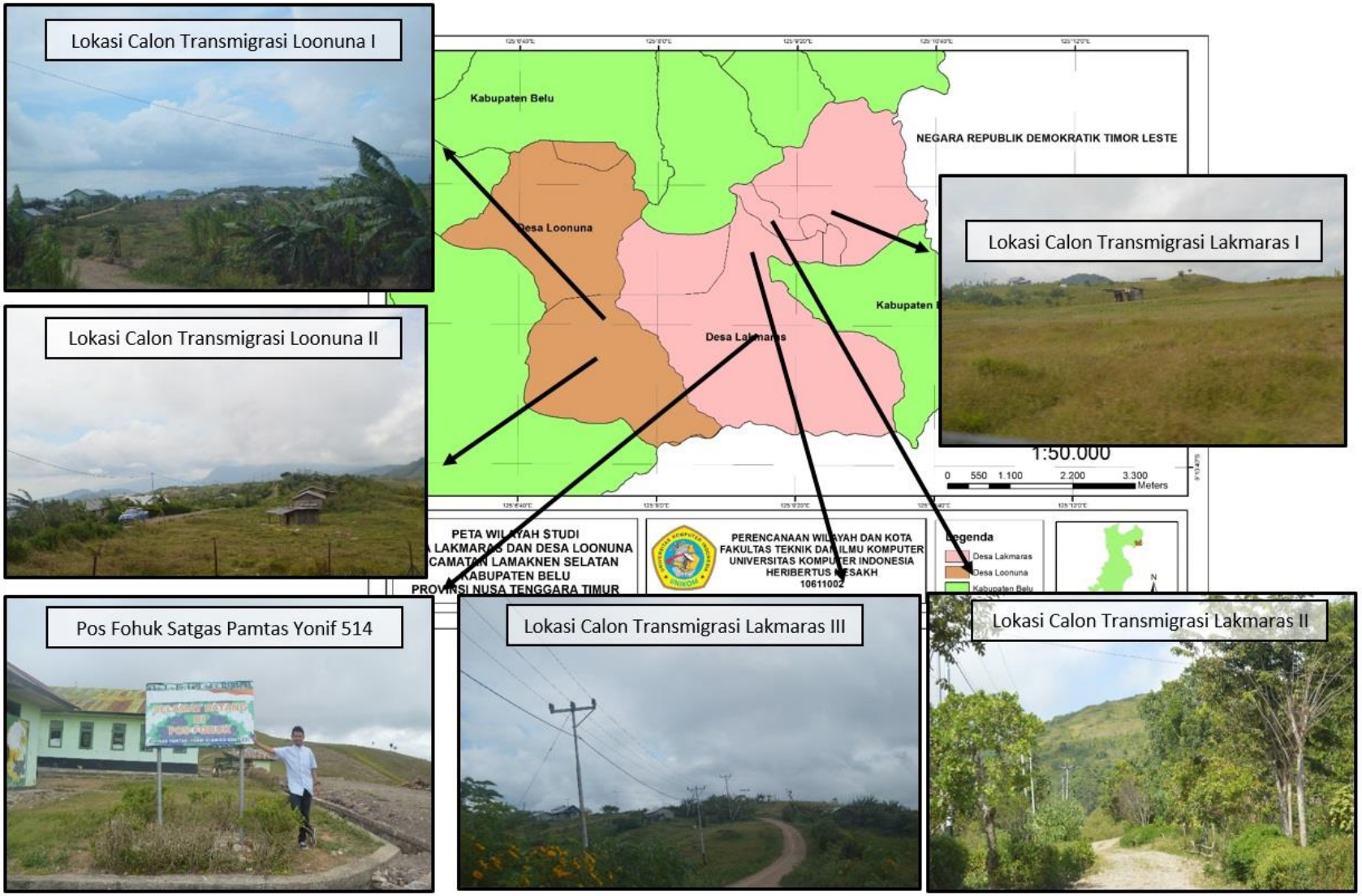
Grafik 3.5 Piramida Penduduk berdasarkan usia di Desa Loonuna Tahun 2014



Rata-rata tingkat pendidikan yang dimiliki oleh penduduk di desa Loonuna adalah SD sampai dengan SMA. Mata pencaharian yang paling utama dari penduduk di desa Loonuna adalah sebagai petani. Jiika dilihat secara kesuluruhan, kedua desa ini memiliki banyak kesamaan, baik secara fisik maupun dari aspek kehidupan lainnya seperti adat istiadat dan kebiasaan hidup seharinya-harinya.

3.4 Wilayah Studi (Lokasi Calon Kawasan Transmigrasi)

Lokasi calon kawasan transmigrasi yang disediakan atau hibahkan masyarakat desa kepada pemerintah untuk dimanfaatkan sebagai kawasan transmigrasi adalah Dusun Kotasai dan Dusun Lesubere di desa Lakmaras serta Dusun Loonuna A dan Dusun Loonuna B di desa Loonuna. Masyarakat dari kedua desa masing-masing menghibahkan tanah /lahan milik mereka seluas ± 300 ha. Total tanah/lahan yang dihibahkan masyarakat kedua desa kepada pemerintah untuk program transmigrasi sebesar ±700 ha. Selanjutnya untuk lokasi calon kawasan transmigrasi (wilayah studi) dapat dilihat pada gambar 3.6 dibawah ini.



Gambar 3.6 Peta Lokasi Kawasan Calon Transmigrasi

3.4.1 Legalitas penetapan wilayah studi sebagai kawasan transmigrasi

Legatitas penetapan suatu wilayah untuk berbagai program pembangunan pemerintah merupakan suatu hal yang sangat penting. Sehingga pemerintah dalam rangka melaksanakan program pembangunan tidak dihadapkan dengan permasalah atau konflik akibat dari

Berdasarkan status lahannya, calon kawasan transmigrasi yang merupakan wilayah studi yaitu desa lakmaras dan desa Loonuna telah resmi dimiliki negara setelah dilakukan pelepasan Hak Atas Tanah oleh tokoh-tokoh masyarakat/tuan tanah sebagai pemilik asal tanah tersebut. Pelepasan Hak Atas Tanah tersebut dilakukan dengan tujuan bagi pengembangan kawasan perbatasan sebagai kawasan transmigrasi lokal.

Aspek legalitas hak atas tanah tersebut kemudian didukung oleh surat rekomendasi wakil Bupati Belu yang mencadangkan areal lahan tersebut sebagai lokasi pengembangan lokasi transmigrasi dan surat pernyataan pelepasan Hak Atas Tanah oleh tokoh masyarakat. Sehingga dengan kedua dokumen tersebut, masing-masing :

1. Surat Pernyataan pelepasan Hak Atas Tanah oleh tokoh masyarakat yaitu :
   Surat Kepala Desa
   Nomor : Ds.Lkms.145/42/III/2014
2. Surat Rekomendasi Wakil Bupati Belu
   Nomor : 144/Nakertrans/KT/III/2004

Maka wilayah studi di desa Lakmaras dan desa Loonuna, kecamatan Lamaknen Selatan, Kabupaten Belu telah memiliki dasar hukum yang kuat untuk di kembangkan sebagai kawasan transmigrasi lokal.